

SKRIPSI

**FENOMENA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
WANITA DITINJAU DARI TEORI FEMINISME**
(Studi Kasus Satuan Polisi Pamong Praja Perkantoran Kabupaten Ogan Ilir)



**NOVI EFENDI
07021281520172**

**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "Fenomena Satuan Polisi Pamong Praja Wanita Ditinjau dari Teori Feminisme Studi Kasus Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ogan Ilir" telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 08 Januari 2020.

Indralaya, Januari 2020

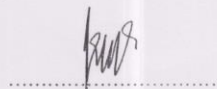
Ketua:

1. Mery Yanti, S.Sos., MA.
NIP. 197705042000122001

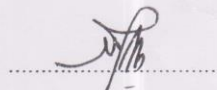


Anggota:

2. Safira Soraida, S.Sos., M.Sos.
NIP. 198209112006042001



3. Drs. Tri Agus Susanto, MS
NIP. 195808251982031003



4. Dra. Yusnaini, M.Si
NIP. 196405151993022001

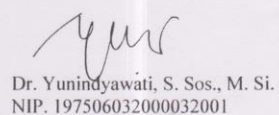


Mengetahui
Dekan FISIP



Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M. Si.
NIP. 196311061990031001

Ketua Jurusan Sosiologi,



Dr. Yunindyawati, S. Sos., M. Si.
NIP. 197506032000032001

RINGKASAN

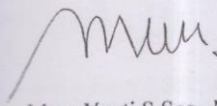
Penelitian ini membahas mengenai "Fenomena Satuan Polisi Pamong Praja Wanita Kabupaten Ogan Ilir Ditinjau dari Teori Feminisme". Permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana fenomena Satpol PP wanita dalam perspektif feminisme eksistensial. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan data deskriptif. Teknik penentuan informan dengan metode *purposive*. Pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dokumentasi yang kemudian dianalisis, direduksi, dan disajikan dengan informasi pendukung temuan untuk memperoleh data valid. Sumber data yang digunakan adalah data primer berupa observasi langsung kelokasi penelitian, wawancara langsung dengan informan lalu juga dilengkapi oleh data sekunder berupa buku, dokumentasi, jurnal dan lainnya yang terkait dengan tema penelitian.

Hasil dari penelitian ini adalah anggota Satpol PP wanita Ogan Ilir memilih pekerjaan ini karena pilihan pribadi dengan tujuan agar lebih mandiri, memiliki penghasilan sendiri dan menambah pengalaman. Meskipun bekerja sebagai Satpol PP, anggota wanita tetap melaksanakan tugasnya dirumah sebagai ibu pada keluarganya. Tugas dan tupoksi yang dilakukan Satpol PP wanita dikhususkan untuk bagian administrasi, notulensi dan sekretaris dengan sebagian anggota wanita yang ikut kelapangan untuk memberikan citra Satpol PP yang humanis, persuasif dan ramah kepada masyarakat. Eksistensi Satpol PP wanita Ogan Ilir diterima oleh masyarakat dengan harapan tindakan represif yang selama ini melekat pada citra Satpol PP berkurang.

Kata kunci: Feminisme, Wanita, Satuan Polisi Pamong Praja

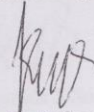
Indralaya,..... 2020
Mengetahui/Menyetujui,

Pembimbing I



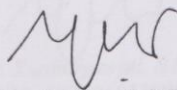
Mery Yanti S.Sos., MA.
NIP. 197705042000122001

Pembimbing II



Safira Soraida S.Sos., M.Sos.
NIP. 198209112006042001

Ketua Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Dr. Yunindyawati, S.Sos., M.Si.
NIP. 197506032000032001

SUMMARY

This research discusses about "The Phenomenon of Women's Civil Service Police Unit Ogan Ilir Regency Judging from the Theory of Feminism". The problem of this research is how the phenomenon of women's Satpol PP in the perspective of existential feminism. The method used in this study is qualitative with descriptive data. The technique of determining informants using purposive methods. Data collection by observation, interview, documentation which is then analyzed, reduced, and presented with supporting information on the findings to obtain valid data. The data source used is primary data in the form of direct observation of research locations, direct interviews with informants and also supplemented by secondary data in the form of books, documentation, journals and others related to the research theme.

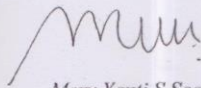
The results of this research present are female Satpol PP members of Ogan Ilir choosing this job because of personal choices with the aim of being more independent, having own income and adding experience. Even though she works as a municipal police officer, she continues to carry out her duties at home as a mother to her family. The tasks and tasks of the female Satpol PP are devoted to the administration, minutes and secretaries with some female members participating in the field to provide a humanist, persuasive and friendly image of the Satpol PP. The existence of Ogan Ilir Women's Satpol PP was accepted by the community so that the repressive actions that had been suppressing the image of Satpol PP had so far been reduced.

Keywords: Feminism, Women, Civil Service Police Unit

Indralaya,2020

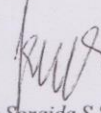
Authorized/Approve,

Advisor I



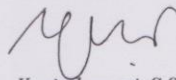
Mery Yanti S.Sos., MA.
NIP. 197705042000122001

Advisor II



Safira Sbraida S.Sos., M.Sos.
NIP. 198209112006042001

Head of Sociology Departement
Faculty of Social Science and Political Science
Sriwijaya University



Dr. Yunindyawati, S.Sos., M.Si.
NIP. 197506032000032001

**SURAT KETERANGAN PENGECEKAN
SIMILARITY**

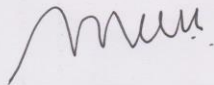
Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Novi Efendi
Nim : 07021281520172
Prodi : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Menyatakan bahwa benar hasil pengecekan similarity Skripsi/Tesis/Disertasi/Lap. Penelitian yang berjudul Fenomena Satuan Polisi Pamong Praja Wanita Ditinjau dari Teori Feminisme (Studi Kasus Satuan Polisi Pamong Praja Perkantoran Kabupaten Ogan Ilir) adalah 9%.

Demikianlah surat keterangan ini saya buat dengan sebenarnya dan dapat saya pertanggung jawabkan.

Menyetujui
Dosen pembimbing,



Mery Yanti, S.Sos., MA.
NIP. 197705042000122001

Indralaya, 16 Maret 2020

Yang menyatakan,



Novi Efendi
NIM:07021281520172

KATA PENGANTAR



Terucap banyak puji dan syukur yang di sampaikan penulis kehadiran Allah SWT yang telah memberikan seluruh nikmat, rahmat, dan karunia dunia beserta isinya, sehingga penulis diberikan kesempatan dan kemampuan untuk dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Fenomena Satuan Polisi Pamong Praja Wanita Kabupaten Ogan Ilir Ditinjau dalam Teori Feminisme Eksistensial”.

Adapun pengajuan skripsi ini ditujukan sebagai pemenuhan beberapa syarat ketentuan kelulusan pada jenjang perguruan tinggi Strata I Universitas Sriwijaya. Melalui penyusunan skripsi ini penulis mengalami pelbagai hambatan, tantangan, kesulitan, kemudahan, dan suka maupun duka yang menyertai penyusunan skripsi ini, namun dengan doa dan dukungan serta usaha penulis pada akhirnya mampu untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini tentunya masih banyak ditemui beberapa kekurangan dan belum maksimal, baik itu dari segi kualitas dan kuantitas. Maka dari itu peneliti dengan segenap hati yang tulus penulis menerima dan memerlukan kritik dan saran agar skripsi dan penulis menjadi lebih baik dari sebelumnya. Selanjutnya penulis juga ingin menyampaikan rasa syukur serta terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir Anis Saggaf, MSCH, selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Ir. Zainuddin Nawawi, Ph.D, selaku Wakil Rektor I bidang akademik Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Mukhtaruddin, S.E., Aj., M.Si, selaku Wakil Rektor II bidang umum, kepegawaian dan keuangan Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. dr. Mohammad Zulkarnain, M.Med. Sc, selaku Wakil Rektor III bidang kemahasiswaan dan alumni Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Ir. A. Muslim, M.Agr. selaku Wakil Rektor IV bidang perencanaan dan kerjasama Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Prof. Dr. Kgs. Muhammad Sobri selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

7. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si. selaku Wakil Dekan I bidang kependidikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Sofyan Effendi, S.Ip., M.Si. selaku Wakil Dekan II bidang keuangan dan kepegawaian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Dr. Andy Alfatih, M.Pa., selaku Wakil Dekan III bidang kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
10. Ibu Dr. Yunindyawati, S. Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
11. Ibu Safira Soraida, S.Sos., M.Sos. selaku Sekretaris Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya dan juga selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya dalam mengoreksi laporan skripsi untuk dapat menyempurnakan penyusunan skripsi dari segi penulisan..
12. Bapak Dr. Dadang Hikmah Purnama, M.Hum. selaku Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan masukan dan saran selama proses perkuliahan.
13. Ibunda Mery Yanti, S.Sos., MA. selaku Dosen Pembimbing I yang telah sabar dalam memberikan arahan serta masukan dalam proses penyusunan skripsi ini.
14. Ibu Vieronica Varbi S., S.Sos., M.Si. selaku Dosen Pembimbing II periode 08 Agustus 2018 sampai 02 September 2019 yang telah meluangkan waktunya dalam mengoreksi laporan skripsi untuk dapat menyempurnakan penyusunan skripsi dari segi penulisan.
15. Seluruh Staff Kepegawaian Universitas Sriwijaya, khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu saya dalam mengurus keperluan akademik selama perkuliahan.
16. Ayahanda Efendi dan Ibunda Enida yang selalu memberikan petunjuk, nasihat, dukungan dan menjadi alasan bagi saya untuk menyelesaikan apa saja yang telah saya mulai.

17. Teman sejawat dan seperjuangan jurusan Sosiologi angkatan 2015, terimakasih sudah menerima dan membimbing serta percaya kepada saya. Mohon maaf jika selama menjadi ketua angkatan saya tidak maksimal.
18. Kepada informan dan segala pihak yang mendukung jalannya penelitian ini, terimakasih untuk waktu dan kesempatannya.

Terakhir tentunya penulis berharap setiap bantuan yang telah diberikan oleh segenap pihak dapat menjadi lading kebaikan serta keberkahan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi kemajuan pendidikan terutama dalam bidang ilmu sosial dan masyarakat.

Indralaya, Januari 2020

Penulis,

Novi Efendi
07021281520172

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Kita kan pulang dengan waktu yang terbuang dan kenangan yang berjalan bersama, berlabuh lelahku dikelambu jiwamu, hapuskan waktu dari nurani.”

“Sembilu yang dulu biarlah berlalu, bekerja bersama hati kita ini insan bukan seekor sapi”

*“Nasib bak cando roda padati
Baputa ka ateh yo galak badarai
Turun kabawah taimpik badan marasai
Barakik-rakik kahulu
Baranang yo katapian
Ka mudiak di hari sanjo
Basakik-sakik dahulu
Basanang yo kamudian
Barugi mako balabo”*

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- Allah SWT sebagai rasa syukur dan tanggung jawab terhadap pada diri hamba
- Ayah lalu terkhusus Ibu tercinta bundo kanduang Enida, semoga bisa menjadi kebanggaan beliau
- Seluruh manusia yang menjadi kawan hamba selama diperantauan

Seluruh pihak yang terlibat dalam membantu pengerjaan skripsi ini

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	
KATA PENGANTAR	
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.4.1 Manfaat Teoretis	10
1.4.2 Manfaat Praktis	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	11
2.1 Tinjauan Pustaka	11
2.2 Kerangka Pemikiran	14
2.2.1 Gambaran Feminisme	15
2.2.2 Feminisme dalam Sejarah	16
2.2.3 Teori Feminisme Eksistensial	19
2.2.4 Wanita yang “liyan”	22
2.2.5 Wanita yang “diri”	23
2.3 Kerangka Berpikir	26
BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1 Desain Penelitian	27
3.2 Lokasi Penelitian	27
3.3 Strategi Penelitian	28
3.4 Fokus Penelitian	29
3.5 Jenis dan Sumber Data	30
3.6 Penentuan Informan	31
3.7 Peranan Peneliti	31
3.8 Unit Analisis Data	32
3.9 Teknik Pengumpulan Data	32
3.10 Teknik Pemeriksaan dan Keabsahan Data	33
3.11 Teknik Analisis Data	34
3.12 Jadwal Penelitian	35

BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....	36
4.1 Gambaran umum daerah	36
4.1.1 Kependudukan.....	39
4.1.2 Komplek perkantoran tanjung senai.....	39
4.1.3 Mata pencaharian	40
4.1.4 Pemerintahan.....	42
4.1.5 Keadaan pegawai sipil.....	42
4.1.6 Budaya	43
4.1.7 Pendidikan.....	44
4.1.8 Struktur Satpol PP	44
4.1.9 Tugas pokok satuan polisi pamong praja	49
4.2 Gambaran umum informan penelitian	51
BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN	55
5.1 Satuan polisi pamong praja wanita dalam perspektif <i>liyan</i>	58
5.1.1 Subordinasi.....	58
5.1.2 Marginalisasi	64
5.1.3 Stereotype.....	67
5.1.4 Kekerasan	69
5.1.5 Beban ganda	71
5.2 Satuan polisi pamong praja wanita dalam perspektif <i>diri</i>	77
5.2.1 Wanita yang bekerja.....	79
5.2.2 Wanita yang berpendidikan.....	81
5.2.3 Wanita yang sadar akan kesetaraan gender.....	84
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	90
6.1 Kesimpulan	90
6.2 Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tinjauan Pustaka	
Tabel 3.1 Fokus Penelitian	
Tabel 3.2 Jadwal Kegiatan Penelitian	
Tabel 4.1 Luas Wilayah Administrasi	
Tabel 4.2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil	
Tabel 4.4 Informan Utama	
Tabel 5.1 Satpol PP wanita dalam perspektif “ <i>liyan</i> ”	
Tabel 5.2 Satpol PP wanita dalam perspektif “ <i>diri</i> ”	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Kabupaten Ogan Ilir	
Gambar 4.2 Peta Pemkab Tanjung Senai	
Gambar 4.3 Struktur Satpol PP Ogan Ilir	
Gambar 5.1 Anggota Wanita bertugas	
Gambar 5.2 Personel Satpol yang	
Gambar 5.3 Barisan upacara	
Gambar 5.4 Rapat yang	
Gambar 5.5 Latihan dasar anggota	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Narasi mengenai wanita tidak hanya mengenai perannya sebagai seorang ibu saja, namun lebih dari pada itu wanita sangat kompleks walau identik dengan kelas kedua, lebih lemah dari laki-laki, sentimental dan asumsi-asumsi lainnya tidak membenarkan kenyataan bahwa atas nama manusia, wanita juga bisa seperti laki-laki. Bukan dalam pengertian wanita menjadi laki-laki tetapi dalam artian kebolehan wanita untuk bertindak, berfikir, berkarya, bekerja, menggubah, mencipta dan lain sebagainya dengan kesempatan dan peluang yang sama seperti yang diperoleh orang kaum laki-laki. Oleh karena perkembangan zaman, wanita menuju ruang publik menjadi suatu fenomena yang akan berdampak pada perubahan sosial yang ada di masyarakat atau sebaliknya.

Wanita yang selama ini identik dengan kepekaan emosional dan suka bawa perasaan terbukti juga sanggup untuk mengambil peran contohnya sebagai pemimpin, bahkan pemimpin suatu daerah, kota maupun provinsi seperti Tri Rismaharini yang saat ini bertugas sebagai walikota Surabaya, lalu ada juga Hj. Khofifah Indar Parawansa yang saat ini bertugas pula menjadi gubernur provinsi Jawa Timur, kedua tokoh tersebut membuktikan bahwa tidak hanya laki-laki saja yang bisa menjadi seorang pemimpin namun wanita juga bisa (Tribunnews, 03 juli 2018). Jika ditelisik dari sejarah, Indonesia juga punya kejadian penting mengenai cikal bakal eksistensi wanita pada masyarakat, kita mengenal jelas dengan kisah-kisah Kartini, Dewi Sartika dan Cut Nyak Dien yang menunjukkan bahwa wanita juga memiliki kemampuan untuk turut andil dalam masyarakat, wanita juga bisa menjadi apa yang dia inginkan sesuai dengan minat dan bakatnya.

Dominasi gender yang diperkuat oleh budaya yang berpaham patriarki menjadi salah satu penyebab terjadinya segregasi dalam bidang pekerjaan apapun di Indonesia, yang berakibat pada pembatasan potensi wanita. Bahwa ada relasi kuat antara sikap masyarakat yang membatasi potensi wanita dengan kesetaraan gender pada suatu wilayah tertentu. Diantara beberapa faktor yang menjadi sebab

segregasi tersebut adalah melekatnya konsep kodrat perempuan sebagai sosok yang berperan memelihara, mengasuh dan melakukan pekerjaan domestik (rumah tangga). Tidak mengherankan bila sektor pekerjaan yang didominasi oleh wanita memiliki sifat-sifat yang dilekatkan kepada wanita itu sendiri. Kondisi pekerja wanita di Indonesia terlampir dalam *Global Gender Gap Report* yang dilansir oleh *World Economic Forum*, tentang kesenjangan berbasis gender dalam akses terhadap sumber daya dan peluang. Dasar indikatornya adalah hak-hak dasar seperti kesehatan, pendidikan, partisipasi ekonomi dan pemberdayaan politik menjadi hal yang belum merata antara perempuan dan laki-laki (Andjani Sari, 2016).

Mengenai dominasi patriarki yang menempatkan wanita pada pilihan kedua, ataupun berperan dirumah saja hal ini didukung oleh budaya yang ada di Indonesia. Untuk diketahui kebanyakan suku budaya yang ada pada masyarakat di tiap daerah terbilang di Indonesia di dominasi oleh paham patriarkhi. Tercatat hanya 5 suku budaya di Indonesia yang berpaham matrilineal yakni Minangkabau di Sumatera Barat, Enggano di Bengkulu, Petalangan di Riau, Aneuk Jame di Aceh dan suku Sakai di Jambi (Parsudi, 1995). Paham patriarkhi menempatkan wanita pada posisi dan pilihan kedua, pekerjaan pada masyarakat di kuasai oleh kaum laki-laki lalu kaum wanitanya hanya di rumah saja untuk mengurus anak dan kehidupan rumah tangga, karena patriarkhi menganggap bahwa untuk keperluan mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan keluarga serta melanjutkan silsilah keturunan cukuplah dikerjakan oleh laki-laki dan untuk urusan rumah tangga oleh wanita. Hal ini menjadikan pendidikan dan pengetahuan serta peluang untuk berkarya masih menjadi hak nya kaum lelaki, dan orang tua tidak terlalu memprioritaskan anak wanitanya. Asumsi yang terkonstruksi dari lama ini juga menyebabkan minimnya motivasi wanita untuk bekerja. Dengan demikian jumlah wanita bekerja masih kalah jauh oleh lelaki.

Selanjutnya pada masyarakat Sumatera Selatan yang di dominasi oleh suku Palembang, suku ogan, suku komering dan suku lainnya yang ada di Sumatera Selatan secara umum nilai dan norma yang ada cenderung dibangun dengan budaya patriarki, garis keturunan pada keluarga ada dipihak ayah. Dominasi patriarki diantaranya terlihat pada pola pembagian kerja dan dominasi penentu

keputusan dalam rumah tangga, yang memposisikan laki-laki sebagai pemenuh nafkah keluarga dalam hal mencari nafkah diluar rumah dan wanita sebagai pengurus rumah tangga, bekerja pada sektor domestik mulai dari bersih-bersih rumah hingga mengurus dan mendidik anak. Sedangkan dalam hal penentuan keputusan dalam rumah tangga diberikan kuasa kepada suami, istri hanya pelaksanaan dari putusan tersebut dan keputusan ini mau tidak mau harus diterima serta dipatuhi (Ernaningsih, 2013). Salah satu bentuk pengaruh patriarki pada masyarakat Sumatera Selatan adalah istilah dan panggilan *wong rumah* yang ditujukan untuk wanita Palembang, sebagian dari istilah ini bermakna sebagai bentuk penghormatan dari pasangan, simbol sosial atau identitas yang dapat menciptakan keharmonisan sosial bagi seseorang di daerah Sumatera Selatan. Namun ada pendapat lain yang menyatakan *wong rumah* merupakan marginalisasi dan symbol kedudukan wanita di kelas kedua, dimana bagi kalangan istri atau wanita yang bekerja berkarier di luar rumah *wong rumah* adalah suatu julukan bagi orang yang tugasnya hanya dirumah dan segala urusan apa yang ada dirumah bisa ditanyakan dan diserahkan kepada *wong rumah*. Bisa disimpulkan *wong rumah* merupakan symbol kedudukan atau strata seseorang di lingkungan masyarakat (Mardinana, 2017).

Penggunaan tuturan *wong rumah* menjadi salah satu delik untuk mengkaitkannya dengan feminisme, sebagaimana *wong rumah* sudah menjadi tuturan kebiasaan adat yang merupakan istilah dan Bahasa sehari-hari yang telah membumi di Sumatera Selatan dalam menganalogi kabar istri kepada teman. Biasanya istilah *wong rumah* diucapkan ketika bertanya kabar kepada teman yang sudah berkeluarga sebagai salah satu opsi untuk memulai percakapan. Namun *wong rumah* sering kali diidentikkan dengan subordinasi gender masyarakat Palembang dan paling parah adalah pelecehan terhadap perempuan. Ketua PKK OKI Maphilinda Syarial Oesman dalam pembukaan seminar peranan ibu dalam menunjang kebijakan kabupaten di Sumatera Selatan (Junaidi, 2016).

Kesantunan dan olah tutur kata Bahasa baik langsung maupun tidak langsung kata *wong rumah* membentuk efek humor, namun juga membentuk efek pelecehan terhadap perempuan, bagi saya “kata *wong rumah* perlu dirubah dan tidak perlu dimasyarakatkan, sebaiknya suami tetap menyatakan istri atau bini saya, tidak layak dengan kata *wong rumahku*, yang mendiskreditkan istri memang urusannya di rumah dan tidak perlu untuk merealisasikan dirinya di luar rumah dan ini menurut saya adalah pelecehan. Banyak istri yang tidak mau di panggil *wong rumah* oleh suaminya (Maphilinda, 2012).

Namun seiring dengan perkembangan, penerapan budaya patriarki dalam keluarga pada masyarakat Sumatera Selatan mulai mengalami perubahan, wanita mulai bekerja dan bekarier diluar sektor domestik, meskipun sebagian ada yang menjalani peran ganda selain pencari nafkah juga tetap mengurus rumah tangga. Demikian hal ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, taraf ekonomi, pertukaran informasi dan mulai ramahnya lowongan pekerjaan terhadap kaum wanita. Hasil Susenas (Survei Ekonomi Nasional) Sumatera Selatan 2017 menunjukkan bahwa tingkat partisipasi wanita dalam pekerjaan mengalami peningkatan dari 51,67% pada tahun 2011, mencapai 53,63% pada tahun 2017, Dengan pembagian 57,05% untuk wanita di perdesaan dan 48,10% pada perkotaan (sumber: BPS Sumsel, 2017). Peluang bagi wanita untuk bekerja menjadi luas dan beragam tidak hanya pekerjaan yang sifatnya feminim seperti juru masak, marketing bisnis, guru, dan lainnya namun juga bisa bekerja pada bidang yang sifatnya maskulin seperti polisi wanita, teknisi, mekanik, satuan polisi pamong praja, bahkan *security* keamanan yang menjadi fenomena dalam masyarakat.

Fenomena merupakan gejala sosial atau peristiwa sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, pengertian mengenai fenomena sosial adalah fakta sosial dalam masyarakat yang dilakukan lantaran adanya bentuk-bentuk perubahan sosial yang diakibatkan oleh masyarakat. Fenomena ini memiliki dampak positif dan negatif yang akan mempengaruhi perubahan dalam masyarakat. Fenomena satuan polisi pamong praja wanita adalah salah satu dari peristiwa sosial dikarenakan wanita yang stigmatisasinya lemah lembut, emosional, tidak rasional dari pada laki-laki, dan lemah fisik ditempatkan pada pekerjaan yang menuntut untuk profesional, Tangguh fisik, cakap bertindak dan umumnya dipandang sering menggunakan kekerasan. Beberapa gejala yang

terjadi adalah adanya dorongan untuk keluar dari peran sektor domestik rumah tangga yang sedari awal merumapan konstruksi dari masyarakat lalu wanita bekerja membantu ekonomi suami, adanya marginalisasi wanita terutama dalam bidang pendidikan, kategorisasi bidang pekerjaan dan beban ganda untuk bekerja serta mengurus rumah tangga tanpa dukungan nyata dari suami (Suhapti, 2012).

Berbicara mengenai pekerjaan wanita yang kini mulai masuk hampir ke pelbagai jenis pekerjaan, salah satunya satuan polisi pamong praja. Menjadi satu dari ragam pekerjaan yang bisa dilakukan oleh wanita, walaupun pekerjaan tersebut identik dengan laki-laki dan maskulinitas akan tetapi pemerintah daerah melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pasal 16 tertulis bahwa wanita juga masuk dalam klasifikasi penerimaan anggota satuan polisi pamong praja. Memang terdapat hal yang berbeda apabila kita berbicara mengenai wanita yang mengambil kerja tapi bukan kerja yang bersifat feminim, terdapat beberapa asumsi mengenai profesionalisme wanita tersebut, apakah maksimal perannya dalam pekerjaan tersebut, bagaimana kendala dan kemudahan yang dihadapi selama bekerja sebagai satuan polisi pamong praja, bagaimana pandangan masyarakat terhadap dirinya dan pekerjaan yang dipilih. Turut meramaikan kazhanah asumsi pada masyarakat mengenai satuan polisi pamong praja wanita yang menjadi fenomena ini.

Kaitannya dengan keamanan membuat satuan polisi pamong praja tidak luput dari perhatian masyarakat. Tetapi gambaran mengenai satuan polisi pamong praja belum sesuai dengan citra dan visi yang ingin diwujudkan, banyak gambaran miring tentang satuan polisi pamong praja tidak lain karena seringkali sebagian oknum satuan polisi pamong praja bertindak represif kepada masyarakat dan terkesan arogan saat menjalankan perannya dalam memelihara keamanan dan ketertiban daerah. Penertiban pekerja seks komersial, pembongkaran bangunan liar dan penertiban pedagang kaki lima selalu berujung pada bentrokan fisik. Tidak berlebihan jika masyarakat memandang anggota satuan polisi pamong praja sebagai instansi dengan anggota yang kasar, arogan dan penindas masyarakat kecil. Kesan tersebut dapat mempengaruhi kinerja satuan polisi pamong praja

karena dapat menimbulkan konflik dan menjadi penghambat kinerja satuan polisi pamong praja.

Guna mengurangi kesan negatif masyarakat kepada satuan polisi pamong praja dan untuk menjadikan instansi ini lebih humanis dalam melakukan kinerjanya, beberapa daerah kini mulai merekrut petugas wanita sebagai anggota satuan polisi pamong praja. Perekrutan anggota satuan polisi pamong praja wanita mulai dilakukan sejak bulan Mei 2011 sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sudah disepakati serta rujukan dari undang-undang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pasal 16 tertulis bahwa wanita juga masuk dalam klasifikasi penerimaan anggota satuan polisi pamong praja disingkat Satpol PP (Sundari, 2013).

Bagaimanapun posisi serta profesinya stigmatisasi wanita yang lemah lagi lembut, halus dan senantiasa menggunakan perasaan atau bawa perasaan kadang-kadang menjadi alasan penghalang yang menggaduh profesionalisme wanita pada tupoksinya dalam berkerja, walaupun pada beberapa situasi dan kondisi tidak dapat dihindari bawah rasa tersebut justru dapat berguna. Dalam pelbagai penyelesaian masalah yang ada di masyarakat, pendekatan cara kekerasan atau yang berhubungan dengan kontak fisik tidaklah menjadi pilihan yang tepat guna, perlunya penanganan oleh kaum wanita karena tak semua hal harus diselesaikan dengan kekerasan, bukankah permasalahan yang diselesaikan dengan baik dan santun adalah salah satu wujud ketentraman dalam bermasyarakat. Namun tugas seorang Satpol PP wanita mendapat kendala karena mereka terpaksa dihadapkan dengan dua hal yang sama pentingnya, harus bisa memilih mana yang menjadi prioritas utama, yakni profesionalitas sebagai Satpol PP dan kewajiban sebagai seorang wanita di dalam lingkungan keluarga (Winny, 2016) karena di Indonesia budaya patriarki masih mengakar kuat, jadi walaupun wanita bekerja akan tetapi sebagai masyarakat masih menuntut peran penuh nya dalam rumah tangga.

Selanjutnya di Kabupaten Ogan Ilir sendiri Satuan Polisi Pamong Praja berpusat di perkantoran Tanjung Senai Kabupaten Ogan Ilir yang berafiliasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar). Sehingga tupoksi dari Dinas Pemadam Kebakaran juga merupakan tanggung jawab Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Ogan Ilir sesuai dengan SK Bupati Ogan Ilir Perda No.12 tahun

2016, Jumlah anggota Satpol PP Ogan Ilir adalah anggota dengan 397 laki-laki atau 88,8% dari jumlah anggota dan 56 wanita atau 12,5% dari jumlah anggota dengan 447 anggota yang status nya sudah Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau 0,8% dari jumlah anggota dan sisanya sebanyak 52 anggota atau 11,5% dari jumlah anggota Satpol PP wanita yang sebagai berstatus tenaga kontrak (sumber: Data Primer, 2018).

Bergerak karena adanya satuan polisi pamong praja wanita, namun pihak dari instansi satuan polisi pamong praja maupun pemerintah kabupaten Ogan Ilir sepertinya belum memberikan sentuhan kesetaraan gender dalam instansinya. Hal ini terlihat pada masih banyak terjadi ketimpangan yang didapatkan Satpol PP wanita Ogan Ilir, seperti pembagian kerja berdasarkan seksisme atau jenis kelamin yakni anggota Satpol PP wanita mendapatkan tupoksi kerja sebagai sekretaris, notulensi, admin bagian informasi yang dianggap merupakan pekerjaan ranah wanita. Selanjutnya ketimpangan mengenai partisipasi anggota Satpol PP wanita dalam partisipasi kerja dilapangan, dikarenakan beberapa anggota Satpol PP wanita ditempatkan pada bagian administrasi maka partisipasi untuk pekerjaan dilapangan didominasi oleh anggota laki-laki lalu anggota wanita sebagai pendamping dengan skala 2 dari 10 anggota yang dibentuk menjadi tim untuk lapangan adalah anggota wanita sehingga banyak anggota wanita bertumpuk pada bagian administrasi dengan jam kerja yang lama dari pada anggota laki-laki. Selanjutnya adalah kurangnya peran anggota wanita pada bagian penjabat dan kepala bagian struktur Satpol PP hanya satu anggota saja yang menjabat sebagai fungsional Satpol PP.

Beberapa waktu lalu berita terbitan *kabarrakyatsumsel.com* Satpol PP wanita Ogan Ilir di indikasi menjadi kebijakan politis dengan aturan penggunaan jilbab merah karena ada instruksi lisan dari pimpinan, akan tetapi masyarakat menanggapinya hal tersebut terindikasi politik karena Plt. Bupati berasal dari partai merah, namun isu tersebut langsung ditanggapi oleh Kasatpol PP Akhmad Fauzi bahwa tidak benar ada muatan politik pada perintah penggunaan jilbab berwarna merah. Keseharian bertugas tidak terjadi pembedaan antara satuan polisi pamong praja baik itu laki-laki dan wanita. Instansi Satpol PP belum melakukan peninjauan ulang pada SK bupati mengenai tugas, wewenang dan keanggotaan

satuan polisi pamong praja yang masih merujuk pada Perda Bupati Ogan Ilir NO. 9 tahun 2013 tentang organisasi dan tata kerja satuan polisi pamong praja Ogan Ilir. Kendati demikian hal ini merupakan masalah yang dihadapi Satpol PP wanita selama berkerja jika melihat dari narasi mengenai kesetaraan gender dan hak-hak wanita (Sumber: Diolah oleh peneliti berdasarkan hasil observasi, 2019).

Eksistensi mengenai Satpol PP wanita Ogan Ilir menjadi hal baru dalam masyarakat Ogan Ilir, selain sebagai pemberian nuansa baru pada pendekatan yang lebih persuasif dan humanis di masyarakat dengan adanya anggota wanita diharapkan mampu menghilangkan stigma kekerasan pada tindakan Satpol PP. keberadaan Satpol PP wanita juga menjadi pilihan baru bagi anak maupun orang tua untuk memilih lapangan pekerjaan.

Selanjutnya dengan melihat dari persentase terhadap jumlah anggota Satpol PP wanita jika dibandingkan dengan laki-laki yang begitu minoritas yakni dengan jumlah 12% dari total keseluruhan anggota dan hanya 0,89% yang berstatuskan PNS menjadi barometer bagi peneliti tentang bagaimana keberadaan dan motiv dari anggota Satpol PP wanita tersebut untuk bekerja disana, lalu bagaimana pula asal ketertarikan mereka untuk memantapkan diri menjadi seorang Satpol PP wanita dengan jumlah pekerja yang sedikit tersebut, peneliti mencoba menyandingkan hal tersebut dengan eksistensi wanita pada lingkungan masyarakat. Selanjutnya dianalisis fenomena ini dengan teori feminisme, karena adanya indikasi eksistensi wanita untuk menjadi Satpol PP, lalu bagaimana pengaruh budaya patriarki yang ada di Ogan Ilir terhadap eksistensi tersebut, menjadi alasan untuk meninjau fenomena satuan polisi pamong praja wanita di Ogan Ilir dengan teori feminisme aliran eksistensial dari Satre dan Simone De Beauvoir. Feminisme merupakan teori dan pergerakan yang lahir dari dunia barat mengenai kesetaraan gender, oponen dari subordinasi, kesempatan dan perlakuan antara laki-laki dan wanita dalam menjalankan hak serta kewajibannya sebagai makhluk sosial. Wanita berhak berpartisipasi dalam segala bidang kegiatan seperti sosial budaya, ekonomi, politik dan Pendidikan serta hak yang sama dalam menikmati pembangunan (Rosemarie, 2006).

Feminisme memberikan wanita gambaran mengenai bagaimana bangkit dari penindasan patriarki yang selama ini membatasi kebebasannya dalam menjalani peran kehidupan. Wanita yang selama ini hanya pada pilihan kedua dan dirumah saja mengurus segala kebutuhan suami, kini bisa untuk berkerja mencari nafkah, membantu perekonomian suami, bertukar peran dengan suami dalam mendidik dan merawat anak, menjadi kebanggaan keluarga karena bisa bekerja diusia muda, hal ini selaras dengan isu pengarus utamaan gender (PUG) yang diselenggarakan pemerintah melalui INPRES No. 9 Tahun 2000 tentang pengarus utamaan gender dalam pembangunan nasional, tujuan akhir PUG adalah transformasi keadaan tidak setara antara wanita dan laki-laki dalam hak dan kodisi sosial menjadi setara bagi keduanya, serta terpenuhunya kebutuhan praktis dan strategis gender.

Bagaimana anggota Satpol PP wanita mampu dalam menjalankan profesi sebagai Satpol PP sekaligus peran tradisionalnya sebagai wanita yang berumah tangga maupun yang belum berumah tangga, bagaimana motif mereka menjadi Satpol PP dan bagaimana pula penilaian dan pandangan masyarakat terhadap fenomena Satpol PP wanita ini, apakah orang tua setuju anaknya berkerja sebagai perangkat keamanan daerah, apakah kebijakan pemerintah terhadap Satpol PP wanita membuat wanita yang memilih perkerjaan tersebut sejahtera dan apakah tidak ada pelanggaran hak dan kewajiban wanita.

Berdasarkan dengan hal yang dijelaskan dalam latar belakang, peneliti mengangkat konsep tersebut sebagai objek penelitian skripsi dengan judul “Fenomena Satuan Polisi Pamong Praja Wanita Ditinjau dari Teori *Feminisme*”. Penelitian mengenai Satpol PP secara *personality* bukan secara kinerja serta dikaitkan dengan teori maupun konsep yang ada masih jarang dipublikasi ataupun diteliti, namun ada beberapa penelitian yang sejalan serta relevan untuk dijadikan rujukan dalam penelitian nanti.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasar pada latar belakang yang sudah diuraikan dan dijelaskan, Munculnya fenomena satuan polisi pamong praja wanita menjadi salah satu lapangan pekerjaan yang bisa diikuti oleh wanita untuk membantu perekonomian dan keluarga serta menjadikan wanita mandiri. Namun dari pada itu apakah wanita bisa dalam menjalankan perannya sebagai satuan polisi pamong praja, bagaimana dengan peran sebagai wanita di sektor domestik rumah tangga, bagaimana dengan budaya patriarki yang berlaku di Sumatera Selatan

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dari itu dapat dirumuskan masalah penelitian dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana fenomena satuan polisi pamong praja wanita Ogan Ilir ditinjau dari teori feminisme eksistensial ?
2. Bagiamanakah eksistensi satuan polisi pamong praja wanita Ogan Ilir dalam masyarakat kabupaten Ogan Ilir ?

2.3. Tujuan Penelitian

Berdasar pada masalah yang dirumuskan untuk itu tujuan penelitian ini adalah untuk guna mengetahui tentang bagaimana bagaimana eksistensi satuan polisi pamong praja wanita Ogan Ilir, dan bagaimana mengenai fenomena satuan polisi pamong praja wanita Ogan Ilir dalam perspektif teori feminisme eksistensial.

1.4 Manfaat penelitian

Berdasar pada tujuan penelitian yang telah dirumuskan maka akan terdapat beberapa manfaat penelitian, pada penelitian ini manfaatnya adalah:

A. Secara teoretis

1. Secara teoretis diharapkan penelitian ini memberikan deskripsi tentang peranan, data, implementasi aktual tentang *feminisme* dan fenomena Satpol PP wanita terutama Satpol PP wanita Ogan Ilir.
2. Penelitian ini juga merupakan implementasi serta kajian lapangan dari mata kuliah Sosiologi Gender, Hubungan Ketenagakerjaan dan Teori Sosiologi Kritis.

B. Secara praktis

1. Memberikan pemahaman dan informasi kepada pembaca mengenai fenomena Satpol PP wanita yang kaitannya dengan teori *feminisme*.
2. Bagi Satpol PP wanita Ogan Ilir ini merupakan moment untuk menunjukkan eksistensinya kepada masyarakat tentang peran dan fenomena Satpol PP wanita.
3. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan menjadi sebuah bahan tinjauan serta referensi untuk memahami konsep dari teori *feminisme* dan peran wanita dalam bekerja di ruang lingkup masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhbar, Husain Usman Purnomo Setiady. 1996. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Astuti, Puji. 2011. *Eksperimen Pembelajaran Matematika Dengan Metode Problem Solving dan Mind Mapping Ditinjau Dari Kemampuan Awal Siswa*. Skripsi. Tidak Dipublikasikan. Surakarta: UMS
- Batu, Purnama N.F. Lumban. 2007. *Eksistensi Tokoh Perempuan dalam The Other Side Of Midnight Karya Sidney Sheldon*. Master Tesis. Tidak Dipublikasikan. Semarang: Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Creswell, John W. 2009. *Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Cryshnanda, Dwilaksana. 2009. *Polisi Penjaga Kehidupan*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Ilmu Kepolisian.
- Denzin, K dan Lincoln, S. 2010. *Handbook Of Qualitatif Research*. Terjemahan oleh Dariyanto. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dzuhayatin, S. R. 2015. *Rezim Gender Muhammadiyah: Kontestasi Gender, Identitas dan Eksistensi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ernaningsih, Samawati. 2013. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Palembang: PT. Ramban Palembang.
- Gross, J. H. & Beutel, N. J. 1986. *Source of conflict between work and family roles*. Volume 10 Nomor 1: 76-88. Academy of Management Review.
- Hadi, M., & Kekuasaan, M. 2017. *Melawan Kekuasaan Laki-Laki: Kajian Feminis Eksistensial*. NUSA, Volume 12 Nomor 4, November 2017: 316–327.
- Hamidjoyo, Kunto. 2004. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Kebijakan Penataan Pemebinaan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Surakarta*. Tesis. Tidak Dipublikasikan. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Indonesia. 2017. *PT. Arcadis and All. 2017. Indonesia 2017*.

- Jaquet, F.G.P. 1985. *Kartini Surat-surat Kepada Nyonya R.M. AbendanonMandri dan Suaminya*. Terjemahan oleh Sulastin Sutrisno. Jakarta: Djambatan.
- Karina. 2017. *Kontribusi Frida kahlo terhadap penyebaran nilai feminis di amerika serikat*. Bandung : Universitas Katolik Parahyangan.
- Lestari Krisbiyantoro, Puji. 2016. *Feminisme Sebagai Teori dan Gerakan Sosial di Indonesia*.
- Lovenduski J. 2008. *State feminism and women's movements*. West European Politics, Volume 31 Nomor 1–2: 169–194.
- Mardinana, M., Adib, dan Pratama, C. 2018. *Tuturan Masyarakat Sumatera Selatan 'Wong Rumah' dalam Perspektif Budaya Islam Melayu*. Volume 12: 135-150. *An Nisa'a*.
- Mazroni dan Eisner, S. 2006. *Psikologi Wanita*. Jakarta: Airlangga.
- Munandar, SCU. 2009. *Suatu tinjauan psikologi : Emansipasi dan peran ganda wanita Indonesi*. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Moelong, Lexy. J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ocoh, Adawiyah. 2015. *Pemikiran Feminisme Eksistensialis Simone De Beauvoir*. Syarat-syarat Memperoleh, Gelar Sarjana. Tidak Dipublikasikan. Yogyakarta: Universitas Islan Negeri Sunan Kalijaga.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja*.
- Peraturan Daerah Kabupaten, Ogan Ilir. 2013. *Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja*. Ogan Ilir.
- Rabe-Hemp, Cara. 2008. *Survival in an "all boys club": policewomen and their fight for acceptance, dalam Criminal Justice Sciences*, Illinois State University, Illinois.
- Rizal, Edwin. 2010. *Polisi wanita: Identitas Diri dan Komunikasi*. Bandung: Universitas Padjajaran
- Sugiyono. 2013. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suparlan, Parsudi. 1995. *Orang Sakai di Riau, Masyarakat Terasing dalam Masyarakat Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

- Suwarni, Sundari. 2013. *Perilaku Polisi; Studi atas Budaya Organisasi dan Pola Komunikasi*. Bandung: Nusa Media.
- Tri ayu, Nutrisia. 2013. *Representasi Nilai Feminisme Tokoh Nyai Ontosoroh dalam Novel Bumi Manusia Karya Pramoedya Ananta*. Makassar: UNHAS.
- Tong, Rosemarie Putnam. 2006. *Feminist Thought: pengantar paling kompherensif kepada aliran utama pemikiran feminis*. Diterjemahan oleh Aquarini Priyanti Priyanti Prabasmoro. Yogyakarta: Jalasutra.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.*
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.*
- Yohanita, T. 2005. *Stres Kerja Ditinjau dari Kemampuan Manajemen Waktu pada Karyawan Pegawai Negeri Sipil*. Skripsi. Fakultas Psikologi UNIKA Soegijapranata. Semarang.
- Winnie, A. 2016. *Analisis Pengaruh Work-Family Conflict dan Stress Kerja Terhadap Kepuasan Kerja (Studi pada Polwan Kantor Polisi Daerah Jawa Tengah)*. Skripsi. Tidak Dipublikasikan. Semarang: Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.

